



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111

Website : <http://kaltim.go.id>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 639);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2014);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
4. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
5. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
9. Nilai Jual kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
12. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN
PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu
Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokkan :

- a. kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di air, alat – alat berat dan alat – alat besar; dan
- b. kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

Pasal 3

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan jeep dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
- d. mobil roda tiga;
- e. alat – alat berat dan alat -alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; atau
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.

- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga)
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol duapuluh lima);
 - c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - f. Pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. Mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
 - h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. Light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); atau
 - j. Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar

Pasal 9

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dengan ketentuan:
- dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ of the road} - PPN)$; dan
 - dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ on the road} - (PPN + BBN + PKB))$.
- (3) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suatu kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar tidak diketahui, namun HPU kendaraan bermotor sebanding diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor – faktor :
- harga kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar dengan jenis, merek, tipe, isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - harga kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - harga kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - harga kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar dengan negara pembuat kendaraan bermotor yang sama; atau
 - harga kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (4) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suatu kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar tidak diketahui, namun NJKB kendaraan bermotor sebanding diketahui, maka NJKB dapat ditentukan dengan ketentuan :
- untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan maksimal 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 10

Terhadap type dan merk kendaraan bermotor dibawah tahun Pembuatan 1980, nilai jual Kendaraan Bermotor mengacu pada NJKB tahun Pembuatan 1980.

Bagian Ketiga

Kendaraan yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 11

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2017 yang tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB, dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor :
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
 - b. harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (3) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Khusus untuk daerah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan, Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB.

- (2) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Dalam hal bus dan microbus masih berbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DPPKB
1	2	3	4	5	6	7	8
6150	GV9029	VOLVO	TRUCK VOLVO FL 10 N	2000	230,000,000	1.300	299,000,000
6151	GV9030	VOLVO	VHD	2002	389,000,000	1.300	505,700,000
6152	GV9030	VOLVO	VHD	2003	399,000,000	1.300	518,700,000
6153	GV9030	VOLVO	VHD	2004	400,000,000	1.300	520,000,000
6154	GV9031	VOLVO	WG 64	1998	209,000,000	1.300	271,700,000
6155	GV9031	VOLVO	WG 64	1999	252,000,000	1.300	327,600,000
6156	GV9031	VOLVO	WG 64	2000	304,000,000	1.300	395,200,000
6157	GV9031	VOLVO	WG 64	2001	373,000,000	1.300	484,900,000
6158	GV9032	VOLVO	WOSTER N STAR 4864 F/10.500cc	1995	113,000,000	1.300	146,900,000
6159	GV9033	VOLVO	YB1 G5A/12.100cc (TRACTOR HEAD)	1998	185,000,000	1.300	240,500,000
6160	GV9034	VOLVO	YF 2 H	1999	188,000,000	1.300	244,400,000
6161	GV9035	VOLVO	YF2A 4/16.991cc (TRACTOR HEAD)	1997	117,000,000	1.300	152,100,000
6162	GV9036	VOLVO	YF2F / 16.991cc (TRAILLER)	1996	106,000,000	1.300	137,800,000
6163	GV9075	VOLVO	YV5N3	1992	86,000,000	1.300	111,800,000
6164	GV9075	VOLVO	YV5N3	1994	95,000,000	1.300	123,500,000
6165	GV9078	VOLVO	YV5N3A	1994	95,000,000	1.300	123,500,000
6166	GV9037	VOLVO	YVF5A / 16.991cc (TRAILLER)	1996	106,000,000	1.300	137,800,000
6167	GW8003	WESTERN STAR	4864F TRONTON	2002	260,000,000	1.300	338,000,000
6168	GW8001	WESTERN STAR	6900 RHD TRACTOR	2010	2,345,000,000	1.300	3,048,500,000
6169	GW8002	WESTERN STAR	6966 S	1997	214,000,000	1.300	278,200,000
6170	GW8004	WESTERN STAR	DIAMOND REAGIAN TRUCK	1992	20,000,000	1.300	26,000,000
6171	GX1001	XCMG	QY 25 K	2013	286,000,000	1.300	371,800,000
6172	GX1002	XCMG	QY50K	2010	372,000,000	1.300	483,600,000
6173	GX1002	XCMG	QY50K	2011	392,000,000	1.300	509,600,000
6174	GX1002	XCMG	QY50K	2012	413,000,000	1.300	536,900,000
6175	GX1002	XCMG	QY50K	2013	435,000,000	1.300	565,500,000
6176	GX1003	XCMG	XZJ5160JSQD	2012	582,000,000	1.300	756,600,000
6177	GX1003	XCMG	XZJ5160JSQD	2013	611,000,000	1.300	794,300,000
6178	GZ6001	ZESTAPA	6C4 16.991cc (TRAILER) ZIEL ROBUR DI	1980	9,000,000	1.300	11,700,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM



H.SURCTO,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 6 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GOBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2017

NILAI JUAL UBAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2017

NO	BENTUK DASAR	BUS	STATIONWAGON / MINIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTEWAGON / DELUPE/BOX DUMP MINI BULD VAV/ CARGO DAN SELAINNYA	TANGKI/ ROAD SWEEPER/ VACUUM/WATER CANON	BAK TRUCK TERBUKA/KAYU	BAK BES/ TANDUM	DUMP TRUCK/ COMPACTOR/ ARMROLL	MIXER	DEREK/ CRANE / CONCRETE PUMP/SKYLIFT	MANHAUL	LODGING TRUCK	CAR CARRIER	TRAILER/ FLATBED/ PRIME MOVER/ SELF LOADER	RIVER CONTAINER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	PICK UP ≤ 2000 2001 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	...	5,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	6,000,000			
		...	7,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000	10,000,000	8,000,000		
		...	10,000,000	10,000,000	11,000,000	14,000,000	14,000,000	11,000,000		
		...	12,000,000	12,000,000	14,000,000	16,000,000	16,000,000	14,000,000		
		...	15,000,000	15,000,000	16,000,000	18,000,000	18,000,000	15,000,000		
		...	18,000,000	18,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000	17,000,000		
		...	21,000,000	21,000,000	20,000,000	22,000,000	22,000,000	18,000,000		
		...	25,000,000	25,000,000	24,000,000	26,000,000	26,000,000	19,000,000		
		...	30,000,000	30,000,000	30,000,000	32,000,000	32,000,000	20,000,000		
		...	35,000,000	35,000,000	35,000,000	37,000,000	37,000,000	25,000,000		
		...	40,000,000	40,000,000	40,000,000	42,000,000	42,000,000	28,000,000		
		...	43,000,000	43,000,000	43,000,000	45,000,000	45,000,000	28,000,000		
		2	LIGHT TRUCK (≤5000 CC) ≤ 2000 2001 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016	...	5,000,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	12,000,000	
				...	6,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000	11,000,000	15,000,000
				...	8,000,000	9,000,000	10,000,000	12,000,000	13,000,000	19,000,000
				...	17,000,000	15,000,000	16,000,000	18,000,000	18,000,000	22,000,000
...	20,000,000			17,000,000	18,000,000	20,000,000	20,000,000	25,000,000		
...	23,000,000			19,000,000	20,000,000	22,000,000	22,000,000	28,000,000		
...	26,000,000			21,000,000	22,000,000	24,000,000	24,000,000	31,000,000		
...	30,000,000			23,000,000	25,000,000	26,000,000	26,000,000	34,000,000		
...	40,000,000			30,000,000	30,000,000	31,000,000	31,000,000	40,000,000		
...	50,000,000			30,000,000	35,000,000	37,000,000	37,000,000	43,000,000		
...	60,000,000			35,000,000	35,000,000	40,000,000	40,000,000	44,000,000		
...	63,000,000			38,000,000	43,000,000	45,000,000	45,000,000	44,000,000		
3	TRUCK >5000 CC ≤ 2000 2001 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016			13,000,000	7,000,000	8,000,000	7,000,000	13,000,000	8,000,000	15,000,000	12,000,000	13,000,000	17,000,000	7,000,000	15,000,000	30,000,000	
				22,000,000	11,000,000	13,000,000	13,000,000	10,000,000	21,000,000	13,000,000	25,000,000	20,000,000	22,000,000	11,000,000	25,000,000	50,000,000	
				32,000,000	16,000,000	18,000,000	18,000,000	30,000,000	30,000,000	18,000,000	36,000,000	29,000,000	32,000,000	40,000,000	16,000,000	36,000,000	72,000,000
				45,000,000	20,000,000	23,000,000	23,000,000	38,000,000	38,000,000	45,000,000	36,000,000	45,000,000	45,000,000	50,000,000	20,000,000	45,000,000	90,000,000
		50,000,000	22,000,000	26,000,000	19,000,000	40,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000	38,000,000	50,000,000	55,000,000	22,000,000	50,000,000	95,000,000		
		55,000,000	24,000,000	30,000,000	22,000,000	42,000,000	42,000,000	55,000,000	60,000,000	40,000,000	55,000,000	60,000,000	24,000,000	55,000,000	100,000,000		
		60,000,000	26,000,000	35,000,000	25,000,000	44,000,000	44,000,000	60,000,000	60,000,000	42,000,000	60,000,000	65,000,000	26,000,000	60,000,000	105,000,000		
		65,000,000	28,000,000	40,000,000	28,000,000	46,000,000	46,000,000	65,000,000	70,000,000	44,000,000	65,000,000	70,000,000	28,000,000	65,000,000	110,000,000		
		70,000,000	30,000,000	45,000,000	31,000,000	48,000,000	48,000,000	70,000,000	71,000,000	46,000,000	70,000,000	71,000,000	30,000,000	70,000,000	115,000,000		
		75,000,000	32,000,000	50,000,000	32,000,000	50,000,000	50,000,000	80,000,000	73,000,000	47,000,000	75,000,000	72,000,000	32,000,000	75,000,000	116,000,000		
		78,000,000	45,000,000	65,000,000	37,000,000	53,000,000	53,000,000	80,000,000	73,000,000	48,000,000	80,000,000	73,000,000	35,000,000	78,000,000	118,000,000		
		79,000,000	50,000,000	75,000,000	39,000,000	54,000,000	54,000,000	80,000,000	74,000,000	49,000,000	83,000,000	74,000,000	38,000,000	79,000,000	119,000,000		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM
KEPALA BIRU

(Signature)

H. SUPRO O.S.H

Pemula Utama Muda

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 6 Desember 2017

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR.

td

DR. H. AWANG PAROEK ISIAK